KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:1773-1277-7952-8826

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.408907/2024

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(013)	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi	:	(08)	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
3. Provinsi	:	(25)	PAPUA
4. Kode/Nama Satker	:	(408907)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA
Sebesar	:	Rp. 435.000.000	(EMPAT RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	435.000.000
013.08.BB.	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp.	435.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	435.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAYAPURA	(063)	Rp.	435.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408907/2024
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1773-1277-7952-8826

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (25) PAPUA
Kode/Nama Satker : (408907) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

Program	: 013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi				435.000.000
Kegiatan	: 5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah				435.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan				
	2. 01	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham				
Klasifikasi Rincian Output 1	: 5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		35,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	417.740.000
Rincian Output	: 01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah		35.00	Rekomendasi Kebijakan	417.740.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM		13,00	Orang	17.260.000
Rincian Output	: 01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah		13.00	Orang	17.260.000

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.

Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum
NIP. 196908141996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408907/2024

DS:1773-1277-7952-8826

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga	: (013)	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi	: (08)	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi	: (25)	PAPUA
Kode/Nama Satker	: (408907)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

							Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	435.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	435.000.000			(2) RPLN	US$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408907/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:1773-1277-7952-8826

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (25) PAPUA
Kode/Nama Satker : (408907) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408907	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**	**-**	**435.000**	**-**	**-**	**-**	**435.000**		
013.08.BB	**Program Pembentukan Regulasi**	**-**	**435.000**	**-**	**-**	**-**	**435.000**		
5250	**Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah**	**-**	**435.000**	**-**	**-**	**-**	**435.000**		
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	417.740	-	-	-	417.740	25 . 51	
01	RM	-	417.740	-	-	-	417.740	063	
5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	17.260	-	-	-	17.260	25 . 51	
01	RM	-	17.260	-	-	-	17.260	063	
	JUMLAH	**-**	**435.000**	**-**	**-**	**-**	**435.000**		

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum
NIP. 196908141996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408907/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:1773-1277-7952-8826

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (25) PAPUA
Kode/Nama Satker : (408907) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**408907**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.382	435.000
		BELANJA BARANG	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.382	435.000
	013.08.BB.5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.382	435.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.238	36.382	435.000

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum
NIP. 196908141996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408907/2024
IV A. B L O K I R

DS:1773-1277-7952-8826

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [408907] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum
NIP. 196908141996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408907/2024
IV B. C A T A T A N

DS:1773-1277-7952-8826

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [408907] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum
NIP. 196908141996031001